

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DI KECAMATAN CIBOGO KABUPATEN SUBANG

Oleh:

Rachma Waty Fazry
rachmafazry@gmail.com

Magister Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

ABSTRAK

Peneliti tertarik untuk meneliti mengenai implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang, disebabkan karena implementasi kebijakan pangan yang belum dilaksanakan secara optimal Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang belum optimal dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya proses implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang ini. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Dalam pemilihan informan, peneliti menggunakan teknik non probability sampling, menggunakan teknik wawancara. Hasil dari penelitian yang dilakukan, menghasilkan kesimpulan bahwa belum optimalnya implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang ditentukan oleh faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Hal ini dilihat dari: sosialisasi tentang ketahanan pangan kepada masyarakat masih belum optimal, sumberdaya manusia dan sarana kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang cukup memadai, namun anggaran dapat dikatakan belum memadai karena masih banyak sosialisasi yang belum terimplementasikan, sikap penyuluh dalam mengerjakan tugasnya tidak bersifat berkesinambungan, belum memiliki Unit Pelaksana Teknis sehingga penyuluh kebingungan akan siapa yang harus melakukan dan apa yang menjadi dasarnya menjadi tidak jelas. Maka atas temuan penelitian di atas, Dinas Ketahanan Pangan harus mempunyai Unit Pelaksana teknis agar penyuluh mempunyai tanggung jawab terhadap sosialisasi yang tidak bersifat berkesinambungan, karena penyuluh menganggap memiliki kewenangan atas tanggung jawab untuk melaksanakan program-program terkait sesuai dengan SOP atas pekerjaannya. Sehingga implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang bisa berjalan secara optimal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan

A. PENDAHULUAN

Pembangunan ketahanan pangan di Indonesia ditegaskan oleh Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 pengganti Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996, yang dibangun berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan. Hal ini menggambarkan bahwa apabila suatu negara tidak mandiri dalam pemenuhan pangan, maka kedaulatan

negara bisa terancam. Undang-Undang Pangan ini menekankan pada pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat perorangan, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermanfaat.

Dengan kata lain, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 diamanatkan bahwa upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan diutamakan

dari produksi dalam negeri. Upaya ini mengisyaratkan supaya dalam memantapkan ketahanan pangan harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan secara integrasi yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Pangan merupakan urusan wajib di pemerintahan daerah yang berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan maka di Kabupaten Subang berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas, yang menjadi unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang.

Selain itu, pencapaian ketahanan pangan dan gizi yang baik merupakan wahana penguatan stabilitas ekonomi dan politik, serta jaminan ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau. Juga sebagai perwujudan komitmen bangsa untuk ikut serta mewujudkan tujuan pembangunan global (*Millennium Development Goals/MDGs*) dalam menurunkan kemiskinan dan kelaparan.

Disisi lain, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka berbagai upaya untuk tetap mengusahakan tercapainya kemandirian pangan pun harus terus dilakukan, dievaluasi, diperbaiki dan diapresiasi. Kemandirian pangan yang dicirikan dengan tersedianya pangan yang bergizi dan aman untuk kesehatan dalam jumlah yang cukup sepanjang waktu merupakan keniscayaan yang tidak terbantahkan sehingga pemerintah dan masyarakat harus terus bekerjasama secara

kreatif dan kritis dalam mewujudkan dan kemudian mempertahankannya.

Untuk saat ini Pemerintah Kabupaten Subang lebih fokus kepada kelompok pangan sayur dan buah. Dimana Pemerintah Kabupaten Subang sedang gencar untuk melakukan optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dalam rangka mendukung Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumber Daya Lokal di Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang yang dinilai masih kurang. Ini dilihat dari banyaknya pekarangan rumah menerapkan konsep KRPL tersebut. Lahan pekarangan dinilai memiliki potensi besar dalam mewujudkan ketahanan pangan berbasis keluarga. Hanya saja, pemanfaatannya belum dilakukan secara maksimal. Mayoritas masyarakat kecamatan Cibogo masih memanfaatkan lahan pekarangan seadanya saja, padahal jika dioptimalkan dapat ditanami beragam jenis tanaman yang bisa memenuhi ketersediaan pangan bagi keluarga.

Sehingga untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi SDA lokal berupa pemanfaatan lahan pekarangan yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pangan alternatif bagi masyarakat dengan mengembangkan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). KRPL adalah rumah penduduk yang mengusahakan pekarangan secara intensif untuk dimanfaatkan dengan berbagai sumberdaya lokal secara bijaksana yang menjamin kesinambungan penyediaan bahan pangan rumah tangga yang berkualitas dan beragam. Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) ini merupakan kegiatan yang mendorong warga untuk mengembangkan tanaman

pangan skala kecil dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah. Menyadari hal tersebut, perlu dilakukan pendampingan kepada masyarakat dalam mengembangkan potensi SDA untuk dikelola secara optimal agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Karena perlu kita sadari bahwa manfaat yang diperoleh dari pengelolaan pekarangan antara lain dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dan gizi keluarga, menghemat pengeluaran harian rumah tangga, dan memberikan tambahan pendapatan. Manfaat tersebut, dapat diperoleh apabila pekarangan dirancang, direncanakan dan dikelola dengan baik yang merupakan salah satu alternatif untuk mewujudkan kemandirian pangan.

Berdasarkan hasil peninjauan awal penelitian dan pemaparan di atas, terdapat beberapa permasalahan bahwa implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang belum optimal. Hal ini terlihat dari indikator sebagai berikut:

1. Sosialisasi tentang Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang merupakan salah satu alternatif untuk mewujudkan ketahanan pangan belum berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari cara penyuluh memberikan kejelasan informasi kepada masyarakat Kecamatan Cibogo dibuat tidak bersifat berkesinambungan.
2. Masih kurangnya sumberdaya manusia sebagai pelaksana yang mempunyai kemampuan dalam menyampaikan materi disertai dengan metode penyampaian yang menarik, unik dan tepat

sasaran. Hal ini dapat dilihat dari sosialisasi tentang Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang merupakan salah satu alternatif untuk mewujudkan ketahanan pangan kurang dipahami maksud dan tujuan dari apa yang disampaikan dan belum bisa diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat Kecamatan Cibogo sendiri. Disisi lain, sumberdaya berupa anggaran juga belum memadai. Ini terlihat dari sarana dan prasana di lapangan yang masih banyak kekurangan mengingat anggaran disesuaikan dengan kemampuan kecamatan jadi hanya bisa mengoptimalkan alokasi anggaran yang ada untuk mewujudkan ketahanan pangan.

3. Komitmen dari penyuluh yang masih setengah-setengah. Hal ini dapat terlihat dari sikap penyuluh dalam mengerjakan tugasnya yaitu sosialisasi tentang ketahanan pangan yang dibuat masih belum konsisten.
4. Belum mempunyai Unit Pelaksana Teknis, sehingga untuk pelaksanaan teknis terkait sosialisasi kewalahan. Hal ini mengakibatkan berkurangnya tanggung jawab penyuluh terhadap sosialisasi yang tidak bersifat berkesinambungan, karena dianggap tidak memiliki kewenangan atas tanggung jawab untuk melaksanakan program-program terkait sesuai dengan SOP atas pekerjaannya.

Dari permasalahan-permasalahan yang terjadi tersebut, perlunya penyelesaian yang dilakukan oleh Dinas

Ketahanan Pangan Kabupaten Subang terhadap Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang. Diantaranya dengan memperhatikan hal-hal yang dapat disesuaikan dengan teori yang dikemukakan oleh C. Edwards III (Subarsono, 2011:90), keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat ditentukan oleh empat variable, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

B. LANDASAN TEORITIS

Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang, maka diambil beberapa teori yang relevan untuk dijadikan referensi dalam penelitian ini. Teori tersebut diambil dari beberapa sumber mengenai implementasi kebijakan ketahanan pangan dan beberapa teori pendukung lainnya.

1. Konsep Kebijakan Publik

Administrasi publik didefinisikan oleh Pasolong (2013:1), yang menyebutkan bahwa:

“Administrasi publik dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan pemerintah dengan publik serta meningkatkan responsibilitas kebijakan terhadap berbagai kebutuhan publik, dan juga melembagakan praktik-praktik manajerial agar terbiasa melaksanakan suatu kegiatan dengan efektif, efisien, dan rasional.”

Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada

bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan.

Selanjutnya Chandler dan Plano (1988:107) dalam Pasolong (2013:38) mengemukakan bahwa:

“Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Bahkan Chandler dan Plano beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.”

Peneliti mengartikan pendapat Chandler dan Plano (1988:107) dalam Pasolong (2013:38) bahwa kebijakan publik diarahkan untuk memecahkan masalah publik untuk memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan urusan-urusan publik. Kebijakan publik sejauh mungkin diupayakan berada dalam rel kebijakan yang beraras pada sebesar-besar kepentingan publik.

Dari pengertian para ahli, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kebijakan publik segala aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi. Dengan kata lain, kebijakan publik diarahkan untuk memecahkan masalah publik untuk memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan urusan-urusan publik.

2. Implementasi Kebijakan

Secara etimologi, implementasi berasal dari bahasa Inggris “*to implement*” yang artinya pelaksanaan dan penerapan. Pengertian ini dipertegas oleh Agustino

(2016:126) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan:

“Implementasi kebijakan adalah sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan.”

Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan program-program atau kebijakan-kebijakan, yang merupakan penerjemahan dari rencana-rencana ke dalam praktek.

Menurut Leo Agustino (2016:128) implementasi kebijakan berkaitan dengan tiga hal, yakni: adanya tujuan atau sasaran, adanya aktivitas dan adanya hasil. Namun ini saja belum cukup. Ini karena implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, di mana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Hal ini sejalan dengan Erwan (2015:21) yang mengemukakan bahwa implementasi pada intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Peneliti mengartikan pendapat Erwan (2015:21) bahwa implementasi kebijakan untuk melaksanakan kebijakan yang harus mempunyai objek seperti kebijakan yang dapat menimbulkan

sesuatu dampak tercapai atau tidaknya sesuatu kebijakan dengan menggunakan sarana-sarana untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

3. Model-model Implementasi Kebijakan

Subarsono (2011:90)

mengemukakan bahwa dalam pandangan Edwards III, melalui model implementasi kebijakan publiknya yang diberi nama *Direct and Indirect Impact on Implementation* menyebutkan ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi pelaksanaan atau implementasi kebijakan publik. Diantara faktor-faktor tersebut secara simultan bekerja dan berinteraksi yang pada gilirannya berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberhasilan implementasi kebijakan publik. Keempat faktor tersebut antara lain:

a. Komunikasi

Dan The first of effective policy implementation is those who are to implement a decision must know what are they suppost to do ... naturally, these communication needed to be accurate, and they must be accurately perceive by implementations, (syarat pertama agar pelaksanaan kebijakan itu efektif, kebijakan ini harus disampaikan/diketahui oleh orang-orang yang diserahi tanggung jawab untuk melaksanakannya dengan jelas ... tentu saja dalam hal ini diperlukan komunikasi yang akurat dan dilaksanakan dengan tepat oleh pelaksana. (Edwards III, 1980:17).

Dengan kata lain, keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi

implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

b. Sumberdaya

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya (*resources*). Implementasi kebijakan akan tidak efektif apabila para implemetor kekurangan sumberdaya yang penting untuk melaksanakan kebijakan. Pentingnya sumberdaya mendapat perhatian penuh dari Edwards III yang menyatakan bahwa: “*implementation orders may be accurately transmitted, clear and consistent, but if implementers lack resources necessary to carry out policies, implementation is likely to be ineffective.*” (implementasi dapat ditransmisikan secara akurat, jelas dan konsisten, tetapi jika pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, implementasi kemungkinan tidak efektif). (Edward III, 1980:53).

Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas konsisten, tetapi apabila implemetor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implemetor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

c. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Implementators are well – disposed toward a particular policy, they are more likely to carry it out the original decision makers intended, but when the implementators attitudes or perspective

different from the decision makers, the process of implementing a policy becomes infinitely more complicated. (jika pelaksana ingin melaksanakan sebuah kebijakan khusus, maka mereka harus dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Tetapi ketika sikap atau pandangan para pelaksana berbeda dengan si pembuat kebijakan maka proses pelaksanaan sebuah kebijakan akan menjadi kompleks). (Edwards III, 1980:89).

Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa apabila sikap-sikap dan perspektif implemetor berbeda dari pembuat kebijakan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumberdaya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas.

Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa SOP menjadi pedoman bagi setiap implemetor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel.

4. Konsep Ketahanan Pangan

Menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian,

perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Sedangkan gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercemin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan Status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Dikutip dari Renstra BKP 2015-2019 (Revisi Ke-1:30) bahwa pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan bertujuan mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan, dengan cara:

1. Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
2. Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan;
3. Memperkuat sistem distribusi dan stabilitas harga pangan pokok;
4. Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui penguatan

pengetahuan dan kesadaran masyarakat;

5. Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal;
6. Meningkatkan keamanan pangan segar.

Adapun sasaran strategis yang merupakan indikator kinerja dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Ketahanan Pangan tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam;
2. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan;
3. Stabilitasnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen;
4. Meningkatnya keragaman konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG);
5. Tercapainya keamanan pangan segar.

C. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, yakni sebuah desain yang memberi kemudahan bagi peneliti untuk merekam, memantau, dan mengikuti proses suatu peristiwa atau kegiatan sebuah organisasi sebagaimana adanya dalam suatu kurung waktu tertentu dan selanjutnya diinterpretasikan untuk menjawab masalah penelitian.

Digunakannya metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimaksudkan untuk membuat detesis, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu obyek, suatu set kondisi pada masa

sekarang serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti. Dengan demikian, informan ditentukan dengan teknik *snowball sampling*, yakni proses penentuan informan berdasarkan informan-informan sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan menggali informasi terkait topik penelitian yang ditentukan.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian dilakukan dimulai pada 01 Juli 2019 sampai dengan 03 Desember 2019. Lokasi penelitian adalah di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang dan Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang.

3.3 Subjek Penelitian

Informan-informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang;
- b) Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- c) Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
- d) Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- e) Masyarakat, dipilih karena merupakan sasaran utama dalam mewujudkan Ketahanan Pangan di Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang.

Dengan demikian, informan pada penelitian ini adalah 6 orang.

3.4 Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data ekunder. Data primer diperoleh melalui jawaban dari wawancara dengan informan, Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu cara sebagai berikut:

- a) Studi Kepustakaan, yaitu melakukan studi kepustakaan, dengan mempelajari teori-teori yang bersumber pada buku-buku perpustakaan, artikel-artikel, makalah-makalah, jurnal-jurnal, dan browsing internet untuk mendapatkan pengetahuan yang berhubungan dengan pelayanan perpustakaan.
- b) Studi Lapangan, yaitu peninjauan lapangan secara langsung pada lokasi/ objek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :
 - 1) Observasi, yaitu pengumpulan data dalam penulisan laporan penelitian dengan melalui pengamatan langsung. Melalui desain ini akan diperoleh data dan informasi tentang gambaran fenomena, fakta, serta sifat bagaimana adanya komprehensif dan integral.
 - 2) Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara tanya jawab meminta keterangan secara langsung kepada pihak yang berkompeten yang ada relevansinya dengan bahasan yang sedang diteliti.

3.5 Teknik Analisis Data

Proses analisis data yang digunakan penulis selama penelitian berlangsung yaitu dengan model analisis Miles and Huberman(2005:15-19), yang terdiri dari:

- a) Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
- b) Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.
- c) Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.
- d) Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kecamatan Cibogo kabupaten Subang dengan menggunakan teori yang

telah dijelaskan pada bagian pendahuluan, maka dengan ini ditarik indikator-indikator yang digunakan yaitu:

1. Komunikasi, yaitu cara yang dilakukan untuk menyampaikan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan atau implementasi program. Dengan indikator-indikator sebagai berikut:
 - a. Kejelasan komunikasi dari Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Subang kepada instansi atau dinas terkait;
 - b. Pelaksanaan sosialisasi yang jelas kepada masyarakat;
 - c. Konsistensi penyuluh sosialisasi KRPL mengenai pencapaian tujuan implementasi kebijakan.
2. Sumberdaya, yaitu kemampuan yang dimiliki dan menjadi pendukung proses pelaksanaan program KRPL, yakni sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya. Dengan indikator-indikatornya sebagai berikut:
 - a. Kecukupan staf yang berkompeten dalam bidang tugasnya;
 - b. Ketersediaan informasi yang diperlukan mengenai implementasi;
 - c. Kecukupan wewenang pada aparat birokrasi;
 - d. Ketersediaan fasilitas yang mendukung pengembangan destinasi wisata.
3. Disposisi, yaitu komitmen dan sikap yang dimiliki para pelaksana sosialisasi untuk melaksanakan keseluruhan

kegiatan implementasi kebijakan pengembangan KRPL. Dengan indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Komitmen dan sikap parapelaksana kebijakan;
 - b. Adanya persamaan persepsi antara implementor dengan dinas-dinas terkait dalam pelaksanaan pengembangan KRPL;
 - c. Kecukupan insentif bagi implementor.
4. Struktur birokrasi, yaitu adanya suatu prosedur yang mengatur tata dan pola aliran pekerjaan dalam proses implementasi program. Dengan indicator-indikator sebagai berikut:
- a. Ketersediaan Standar Operating Procedures (SOP) bagi implementor;
 - b. Hubungan koordinasi yang baik dengan instansi-instansi terkait.

A. Pembahasan Mengenai Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang

Pembahasan mengenai implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kecamatan Cibogo kabupaten Subang dengan berdasarkan teori yang telah dikemukakan oleh George C. Edward III (Subarsono, 2011:90) bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat ditentukan oleh empat variable, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hal tersebut, kemudian peneliti dapat menjelaskan mengenai hasil wawancara setiap informan penelitian

dan observasi di lapangan mengenai implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kecamatan Cibogo kabupaten Subang dengan mengacupada dimensi atau sub variabel sebagai berikut:

1. Dimensi Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi komunikasi dalam indikator kejelasan komunikasi dari Dinas Ketahanan pangan kepada instansi atau dinas terkait dalam pengembangan KRPL sudah belum jelas dan belum dilaksanakan dengan baik. Ini dapat terlihat dari jadwal kegiatan rapat internal yang belum berjalan secara berkesinambungan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi komunikasi bahwa indikator pelaksanaan sosialisasi yang jelas kepada masyarakat belum dilaksanakan dengan baik. Ini dapat terlihat dari jadwal kegiatan rapat internal yang belum berjalan secara berkesinambungan.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi komunikasi untuk indicator konsistensi perintah mengenai pencapaian tujuan implementasi sosialisasi KRPL belum dilaksanakan dengan baik. Ini terbukti dengan program yang dibuat belum terencana dan terjadwal sehingga hal ini menjadikan perintah-perintah tersebut tidak konsisten dilakukan.

2. Dimensi Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi sumber daya untuk indicator kecukupan staff yang berkompeten dalam bidang tugasnya belum tercukupi, hal ini disebabkan karena kurangnya pembinaan pegawai dan pengangkatan pegawai oleh pemerintah. Padahal jika sebuah konsep kebijakan sudah dibuat sedemikian rupa bagusnya

tapi dalam pelaksanaan SDM-nya masih kurang, apalagi yang berkompeten maka hal tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, karena tidak ada orang yang dapat mengendalikannya dengan tepat.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada dimensi sumberdaya bahwa indikator ketersediaan informasi yang diperlukan mengenai implementasi sosialisasi KRPL belum cukup baik, Ini dapat terlihat dari sosialisasi yang dilakukan tidak bersifat berkesinambungan. Dimana tidak ada tindakan dalam tahapan selanjutnya.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi sumber daya untuk indicator kecukupan wewenang pada aparatur birokrasi belum ada sehingga belum berjalan dengan optimal. Hal ini karena Dinas ketahanan pangan Kabupaten subang belum memiliki Unit Pelaksana Teknis.

Selanjutnya dalam indikator ketersediaan fasilitas yang mendukung sosialisasi KRPL di Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang masih kurang peralatan berupa sarana dan prasana di lapangan yang masih banyak kekurangan.

3. Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi disposisi untuk indikator komitmen dan sikap para pelaksana kebijakan belum berjalan dengan baik. Ini dapat terlihat dari komitmen penyuluh yang masih setengah-setengah dalam mewujudkan ketahanan pangan, sehingga sosialisasi yang dilakukan masih belum bersifat kesinambungan.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi disposisi dalam indikator persamaan persepsi antara implementor dengan instansi atau dinas terkait dalam

pelaksanaan sosialisasi KRPL belum berjalan baik. Hal ini karena terbatasnya kewenangan diantara instansi-instansi tersebut sehingga menyebabkan sulitnya menyatukan persamaan persepsi antara implementor dengan instansi atau dinas terkait dalam pelaksanaan sosialisasi KRPL.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dan observasi dalam dimensi disposisi pada indikator kecukupan insentif bagi implementor memang masih kurang, dimana tidak ada uang tambahan atau insentif dalam sosialisasi KRPL ini. Sehingga tidak ada motivasi lebih untuk para penyuluh dalam bekerja.

4. Struktur birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi struktur birokrasi untuk indicator ketersediaan Standar Operating Procedures (SOP) sudah ada dan sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang ada.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada dimensi struktur birokrasi untuk indikator hubungan koordinasi yang baik dengan instansi atau dinas terkait belum dapat berjalan dengan optimal. Hal ini terhambat karena perbedaan visi misi maupun kepentingan instansi atau terkait padahal jika hubungan koordinasi tersebut sudah baik maka akan mempermudah dalam mengambil keputusan dalam sebuah kebijakan. Kemudian dibutuhkannya saling dukung antar instansi tersebut agar lebih mempererat hubungan kerjasama.

B. Hambatan-Hambatan Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan peneliti melihat memang bahwa mengenai implementasi

kebijakan tentang pengembangan Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis masih menghadapi hambatan-hambatan. Kemudian hambatan-hambatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Dimensi Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi komunikasi hambatan dalam indikator kejelasan komunikasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis kepada instansi-instansi terkait dalam pengembangan destinasi wisata hambatannya dari segi penyatuan waktu yang tepat dengan instansi instansi terkait hal ini disebabkan karena masing-masing institusi mempunyai beberapa program diinstitusinya sendiri dan pasti membutuhkan waktu, sedangkan untuk komunikasinya dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis biasanya dengan cara rapat koordinasi sedangkan untuk hadir dalam acara tersebut sangat susah karena harus mengatur waktu yang tepat dengan pemangku-pemangku kepentingan tersebut.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi komunikasi hambatan dalam indikator pelaksanaan sosialisasi yang jelas kepada masyarakat yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang apa yang telah disampaikan dalam sosialisasi. Padahal dalam era demokrasi ini menghendaki adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam sebuah perumusan kebijakan sehingga kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dapat terealisasikan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi komunikasi hambatan dalam indikator konsistensi perintah mengenai pencapaian tujuan implementasi kebijakan

pengembangan destinasi wisata yaitu keterbatasan kompetensi SDM yang ada belum terlalu cekatan dalam bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan hal ini biasdisebabkan karena beberapa faktor yaitu masih kurangnya pembinaan pada pegawai, insentif yang kurang maupun kurangnya jumlah SDM yang ada.

2. Dimensi Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi sumber daya hambatan dalam indikator kecukupan staff yang berkompeten dalam bidang tugasnya yaitu bersumber dari belum adanya kebijakan untuk menambah jumlah pegawai hal ini berdampak pada krisis pegawai dan yang ada pun masih sangat terbatas.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada dimensi sumber daya hambatan dalam indikator ketersediaan informasi yang diperlukan mengenai implementasi kebijakan pengembangan destinasi wisata yaitu bersumber dari keterbatasan kompetensi SDM. Selama ini SDM menjadi sumber dari hambatan disetiap indikator karena baik dari segi jumlah pegawainya, kompetensinya maupun kemampuan dalam mengimplementasikan kebijakan selama ini masih kurang.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada dimensi sumber daya hambatan dalam indikator kecukupan wewenang pada aparatur birokrasi pada dimensi sumber daya hambatan dalam indikator aparatur birokrasi bersumber dari kurang kuatnya will dari pimpinan sebagai penyambung wewenang yang berbeda sehingga sampai saat ini masalah tersebut belum menemukan solusi yang tepat.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada

dimensi sumber daya hambatan dalam indikator ketersediaan fasilitas yang mendukung pengembangan destinasi wisata di Astana Gede Kawali bersumber dari keterbatasan anggaran. Padahal untuk menarik wisatawan berkunjung salah satunya dengan adanya fasilitas yang memadai serta menarik agar mempunyai ciri khas, pemerintah sudah semestinya menyediakan anggaran yang memadai.

3. Dimensi Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi disposisi hambatan dalam indikator komitmen dan sikap para pelaksana kebijakan bersumber dari masih terdapatnya egosentris diantara para pelaksana kebijakan tersebut. Bahwa selama ini hambatan dalam komitmen dan sikap para pelaksana kebijakan sebenarnya saling keterkaitan satu sama lain, masalahnya sangat kompleks tetapi bisa diatasi jika sejak awal sudah dibangun komitmen yang kuat.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi disposisi hambatan dalam indikator persamaan persepsi antara implementor dengan dinas-dinas terkait dalam pelaksanaan pengembangan destinasi wisata bersumber dari perbedaan system kewenangan yang dimiliki masing-masing dinas terkait sehingga menjadikan kewenangan yang dimiliki menjadi terbatas dan sulit menyatukan persamaan persepsi.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi disposisi hambatan dalam indikator kecukupan insentif bagi implementor yaitu karena belum adanya aturan yang mengatur untuk insentif Non-PNS. Hal ini tentunya bentuk ketidakadilan karena banyak juga yang belum PNS tapi mereka sudah tua bahkan sudah

berpengalaman hal ini perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi struktur birokrasi hambatan untuk indikator ketersediaan Standar Operating Procedures (SOP) bagi implementor sudah ada dan sudah dijalankan sesuai dengan SOP yang ada namun menemui hambatan disebabkan seperti sulitnya mengaplikasikan tugas sesuai dengan SOP yang ada ke masyarakat karena perbedaan pemahaman. Banyak masyarakat yang belum mengetahui berbagai aturan yang boleh atau tidak boleh dilakukan di Astana Gede Kawali.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi struktur birokrasi hambatan dalam indikator hubungan koordinasi yang baik dengan instansi-instansi terkait disebabkan adanya perbedaan kepentingan sehingga menyebabkan saling lempar tanggung jawab antar instansi tersebut.

Perbedaan kepentingan diantara instansi-instansi terkait memang wajar adanya tetapi bagaimana untuk menyatukannya sehingga tidak ada lagi batas diantara instansi-instansi tersebut.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi struktur birokrasi hambatan indikator kejelasan instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan belum ada tata kelola SDM yang sesuai dengan kemampuan dalam bidangnya masing-masing. Hal ini akan menghambat dalam implementasi kebijakan karena kompetensi yang tidak sesuai dapat mengakibatkan lamanya kebijakan tersebut dapat diimplementasikan.

C. Upaya-Upaya yang Dilakukan untuk Menanggulangi Hambatan-Hambatan yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan tentang Pengembangan Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan hasil observasi peneliti dilapangan diketahui bahwa adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mempengaruhi implementasi kebijakan tentang pengembangan Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis dilakukan beberapa upaya.

Dalam hal ini upaya-upaya yang dilakukan pada indikator-indikator sebagai dasar ukurannya terdapat 13 (tiga belas) indikator yang memerlukan upaya-upaya guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Upaya-upaya yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Dimensi Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi komunikasi upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam indikator kejelasan komunikasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis kepada instansi-instansi terkait dalam pengembangan destinasi wisata yaitu dengan sharing mengenai program kebijakan dengan institusi-institusi terkait sehingga bisa saling bertukar informasi serta dapat bekerjasama dalam pengembangan Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi komunikasi upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam

indikator pelaksanaan sosialisasi yang jelas kepada masyarakat yaitu melakukan sosialisasi secara terpadu dan berkelanjutan.

Masyarakat yang ikut serta dalam sosialisasi tersebut dilakukan secara bergantian hal ini dimaksudkan agar antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain dapat saling bertukar informasi dalam sosialisasi yang berbeda. kemudian berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi komunikasi upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan untuk indikator konsistensi perintah mengenai pencapaian tujuan implementasi kebijakan pengembangan destinasi wisata yaitu dengan komunikasi yang jelas serta intens dengan para pemangku kebijakan agar menjadikan perintah pemerintah tersebut dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat sasaran.

2. Dimensi Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi sumber daya upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam indikator kecukupan staff yang berkompeten dalam bidang tugasnya yaitu dengan cara rekrutmen pegawai dan pembinaan pada pegawai. Rekrutmen pegawai sendiri dilakukan untuk mengatasi krisis pegawai sehingga dengan jumlah pegawai tertentu dapat mempercepat proses berbagai kebijakan, sedangkan pembinaan pegawai sangat penting dilakukan ini tujuannya untuk menambah kompetensi pegawai yang ada.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi sumber daya upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam indikator ketersediaan informasi yang diperlukan mengenai implementasi

kebijakan pengembangan destinasi wisata yaitu dengan pembinaan pada pegawai. Banyak pegawai atau para pelaksana kebijakan itu sendiri tidak mengetahui apa saja informasi yang diperlukan untuk menunjang sebuah pengembangan destinasi wisata baik itu dari segi aturannya maupun sanksi bagi pelanggar aturan tersebut.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi sumber daya upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam indikator kecukupan wewenang pada aparatur birokrasi yaitu dengan melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam pengembangan destinasi wisata situs Astana Gede Kawali. Jadi tidak dengan saling diskriminasi karena perbedaan kewenangan yang dimiliki masing-masing instansi, dengan hal tersebut maka pengembangan di Astana Gede Kawali dapat diimplementasikan dengan baik. Hal ini tentunya dapat berdampak juga pada jumlah kunjungan wisatawan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi sumber daya upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam indikator ketersediaan fasilitas yang mendukung pengembangan destinasi wisata ialah kerjasama dalam berbagai program kebijakan dengan instansi-instansi lain sehingga mendatangkan sumber pendapatan di luar anggaran yang tersedia, ini ditujukan supaya tidak terpaku pada anggaran yang ada. Hal itu tentu sebuah upaya yang baik karena dengan hal tersebut dapat mempererat hubungan kerjasama serta ikut berpartisipasi dalam berbagai program kebijakan instansi-instansi lain juga dapat sharing saling

bertukar informasi terhadap berbagai kebijakan yang telah dibuat.

3. Dimensi Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi disposisi upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam indikator komitmen dan sikap para pelaksana kebijakan ialah dengan membina hubungan kerjasama yang baik secara kekeluargaan dan saling dukung. Hal ini dilakukan karena biasanya dengan menciptakan suasana dalam lingkungan kerja yang baik akan berdampak pula pada keberhasilan pencapaian tujuan yang ingin dicapai.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi disposisi upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam indikator persamaan persepsi antara implementor dengan dinas-dinas terkait dalam pelaksanaan pengembangan destinasi wisata yaitu dengan melakukan pertemuan dengan pemangku-pemangku kepentingan dan membuat skala prioritas untuk menyamakan persepsi. Skala prioritas disini tujuan yang hendak dicapai, hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir perbedaan paham antara implementor dengan dinas-dinas terkait pengembangan destinasi wisata situs Astana Gede Kawali sehingga dapat menyamakan persepsi. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi disposisi upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam indikator kecukupan insentif bagi implementor yaitu dengan cara menginput kebutuhan pegawai ke BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia). Hal ini dilakukan sebab belum adanya regulasi yang mengatur insentif untuk non PNS hal tersebut telah diupayakan salah

satunya ke BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) dengan memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang pegawai butuhkan.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi struktur birokrasi upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam indicator ketersediaan Standar Operating Procedures (SOP) bagi implementor yaitu dengan memberikan informasi yang jelas tentang berbagai program kebijakan sesuai dengan SOP yang ada kepada masyarakat. Karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui berbagai aturan yang boleh atau tidak boleh diambil alih tugasnya oleh masyarakat dalam pengeolaan destinasi wisata.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi struktur birokrasi upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam indicator hubungan koordinasi yang baik dengan instansi-instansi terkait yaitu dengan menjalankan tugas sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang dan apa yang telah diinformasikan seperti ketika diadakan rapat koordinasi antar instansi-instansi terkait, untuk kegiatan di Astana Gede Kawali agar bisa menarik kunjungan wisatawan maka diadakan sebuah kegiatan atraksi wisata. Maka Dinas Pariwisata bertugas untuk mempromosikannya, jadi hal tersebut sudah ada pembagian tugas masing-masing.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi struktur birokrasi upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam indicator kejelasan instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan yaitu dengan mengajukan pengusulan SDM

yang sesuai dengan kompetensi dalam bidangnya ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah). Hal ini untuk mempermudah dalam melaksanakan berbagai kebijakan agar lebih efektif serta sesuai dan tepat sasaran.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang ditentukan oleh faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang belum optimal, hal ini terutama dilihat dari:

1. Sosialisasi tentang ketahanan pangan kepada masyarakat masih belum optimal, hal ini dapat terlihat dari sosialisasi tentang ketahanan pangan belum berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tetapi jika memungkinkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang selalu berusaha untuk melakukan sosialisasi KRPL ini.
2. Sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya alam belum sepenuhnya mendukung. Ini dilihat dari hasil penelitian bahwa sosialisasi yang dilakukan belum berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Disisi lain belum terdapat pelaksana teknis dan belum terdapat semua peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan KRPL ini. Namun untuk meminimalisir hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten

Subangdan masyarakat mencari alternatif sejumlah perlengkapan yang bisa menggunakan barang bekas seperti, paralon dan ember.

3. Penyuluh penyuluh mempunyai komitmen yang tinggi dalam mewujudkan ketahanan pangan, namun sosialisasi yang dilakukan masih belum bersifat kesinambungan. Tetapi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang selalu berusaha untuk melakukan sosialisasi KRPL ini menjadi program yang berkesinambungan.
4. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang saat ini belum memiliki Unit Pelaksana Teknis padasetiap kecamatan sehingga sedikit mengalami kewalahan untuk menjalankan sosialisasi di luar kantor. Tetapi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang akan membuat Unit Pelaksana Teknis dalam waktu dekat, sehingga program KRPL ini dapat berjalan seperti yang diharapkan.

Bogor: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (BBPPSLP).

- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Estiasih, Teti. 2009. *Ketahanan Pangan*. Malang: Bumi Aksara.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Creswell, John W. 2013. *Research Design*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dedi. 2015. *Sistem Informasi dan Pemetaan Sumberdaya Lahan Mendukung Swasembada Pangan*. Bogor: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (BBPPSLP).
- Suaib, Muhammad Ridha. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik: Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publi, Good Governance, Hingga Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta: Calpulis.
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPD).
- Thoha, Miftah. 2014. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan Publik: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Witaradiya, Kerta. 2010. *Implementasi Kebijakan Model C. G. Edward III*. Melalui: [https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-
implementasi-kebijakan-model-c-g-edward-iii/](https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan-model-c-g-edward-iii/) [17/07/2019]
- Dokumen-dokumen:
Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/ OT.140/12/2010.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
- Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.